

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Stewardship

Menurut Davis teori *stewardship* menggambarkan suatu fenomena pada saat seorang manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi untuk tujuan utamanya bukan termotivasi terhadap kepentingan individu. Dalam teori ini, manajemen bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan yang telah diamanahkan kepadanya. Uraian tersebut, menunjukkan bahwa manajemen atau pemerintah desa (*steward*) akan menjalankan tugas dan fungsi serta akuntabilitasnya demi kepentingan bersama (masyarakat) sehingga kesejahteraan masyarakat (*principal*) dapat terwujud.¹

Teori ini juga beranggapan terdapat hubungan antara organisasi pemerintah dengan harapan yang akan dicapai yakni mensejahterakan masyarakat. Organisasi pemerintah merupakan suatu lembaga yang dipercaya masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang telah dikerjakan selama periode yang telah ditentukan.²

Teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah setiap aparat desa memiliki tujuan yang sama yaitu tidak hanya untuk mensejahterakan masyarakatnya namun juga memperbaiki potensi desa. Keterlibatan teori ini pada aparat desa sebagai lembaga yang sudah dipercaya masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat mewujudkan keinginan yang diharapkan yaitu terpenuhinya laporan pertanggungjawaban, terciptanya sistem pengendalian internal yang baik dan transparansi akan hal yang berhubungan dengan finansial serta akuntabilitas yang baik sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

¹ Lex Donaldson and James H Davis, "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns Related Papers CEO Dualit y: A Review and Research Agenda Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns," *Australian Journal of Management* 16, no. 1 (1991): 49–64.

² Galura Pangatikan, "Organisasi Pemerintahan," gelarpangestu.blogspot.com, 2017, <https://gelarpangestu.blogspot.com/2017/04/organisasi-pemerintahan.html>.

B. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut UU yang membahas tentang desa, mengartikan dana desa itu berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa melalui APBD dan diaplikasikan guna membiayai kegiatan pemerintah, alokasi pembangunan, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.³ Oleh karena itu dana desa menjadi sumber utama dalam hal peningkatan potensi desa, terjadinya peningkatan potensi desa juga membutuhkan musyawarah pengambilan keputusan atau bisa disebut dengan Musrenbang desa. Dengan adanya dana desa juga bisa menyebabkan permasalahan baru, salah satunya yakni masih banyak masyarakat yang kurang yakin dengan pengalokasian dana desa selain itu masyarakat juga kurang kritis dalam hal pengawasan pada saat penyelenggaraan alokasi dana desa. Masalah ini juga sangat berhubungan dengan kondisi aparat desa yang dianggap rendah kualitas SDM dan prinsip akuntabilitasnya.⁴

Akuntabilitas menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Namun akuntabilitas menurut Adriansah merupakan kewajiban bertanggungjawab dari keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan tujuan yang telah dijalankan dari fase sebelumnya dan dilanjutkan secara teratur.⁵ Sedangkan akuntabilitas menurut Sumpeno ialah, mewajibkan kesanggupan pemerintah desa agar selalu bertanggungjawab atas hasil aktivitas dari pengelolaan dana desa yang pelaksanaannya berhubungan dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah keharusan pemerintah untuk melapor dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dijalankan

³ Peraturan Pemerintah RI, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara” (Jakarta, 2014).

⁴ Redaksi KPPN, “Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya,” Kementerian Keuangan RI, 2021, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>.

⁵ Adriansah Polutu, “Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” 2022.

⁶ Sumpeno Wahjudin, “Perencanaan Desa Terpadu,” 2011, 213.

sebelumnya baik keberhasilan maupun kegagalan, menggunakan akses pertanggungjawaban yang digunakan secara sistematis dan terstruktur. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada pemerintah publik. Menurut Mada indikator untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa, yaitu:⁷

1. Kejujuran dan keterbukaan informasi
2. Kepatuhan dalam pelaporan
3. Kesesuaian prosedur
4. Kecukupan informasi
5. Ketepatan penyampaian laporan

Berikut macam-macam akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh Lembaga pemerintahan antara lain:⁸

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD/ dan masyarakat luas.

⁷ Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, and Hendrik Gamaliel, "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 8, no. 2 (2017): 106–15, <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>.

⁸ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3* (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN., 2015), 10.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah tanggung jawab suatu lembaga publik pada saat mengplikasikan uang publik (*public money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Semakin naiknya tuntutan rakyat terhadap program pemerintahan yang baik dan bersih juga menyongsong pengembangan dan diterapkannya sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan adanya sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa, implementasi sistem tersebut guna agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yang pasti penuh bertanggung jawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.⁹

Menurut Mardiasmo akuntabilitas memiliki beberapa indikator diantaranya:¹⁰

1. Perencanaan

Merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam merencanakan tindakan yang akan dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah.

2. Pengendalian

Merupakan alat untuk memberikan rencana secara detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan suatu saat dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

3. Kebijakan fiskal dan politik

Merupakan alat untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta dapat memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangann terhadap prioritas tersebut.

4. Koordinasi dan komunikasi

Komunikasi dan koordinasi diharuskan ada ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakannya suatu anggaran pemerintah.

5. Penilaian kinerja dan motivasi

Berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran, serta memotivasi para anggota

⁹ Martini, "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa," 2019.

¹⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), 78.

organisasi agar selalu bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas dalam pandangan Islam pada dasarnya tanggung jawab dalam Islam itu berasaskan atas perbuatan diri sendiri saja sebagaimana dijelaskan dalam surat Al An'am ayat 164 sebagai berikut:

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ أَبْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain[526]. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."

Dalam surat Al Mudatstsir ayat 38 dinyatakan:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya"

Perbuatan individu yng dimaksud merupakan suatu gerakan yang dilakukan seorang pada waktu, tempat dan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin bisa meninggalkan bekas atau pengaruh pada orang lain. Tanggungjawab bukan hanya terhadap apa yang diperbuatnya akan tetapi meluas sampai semua akibat dan bekas-bekas dari perbuatan tersebut. Orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah atau anak yang sholeh, semuanya akan meninggalkan bekas sampai kapanpun.

Seseorang yang berperilaku baik atau jahat dapat dilihat bahwa akan mendapat pahala atau menanggung dosanya ditambah dengan pahala atau dosa orang-orang yang meniru perbuatannya. Tanggung jawab seseorang berhubungan erat dengan kewajiban yang

dibebankan padanya. Semakin tinggi jabatan di masyarakat maka semakin tinggi pula tanggungjawab yang harus diterapkan. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas perilaku dirinya, keluarganya, saudaranya dan rakyatnya. Hal ini ditegaskan Allah yang artinya; “Wahai orang-orang mukmin peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”(QS. At Tahrim: Sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah saw: “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.”(Al Hadit)

Tanggung jawab ini bertingkat tergantung levelnya. Kepala keluarga, kepala desa, camat, bupati, gubernur, dan kepala negara, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ruang lingkup yang dipimpinnya. Seorang mukmin yang cerdas senantiasa akan memperbaiki dirinya, keluarganya dan semua yang menjadi tanggungannya. Pemimpin dalam level apapun akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah akan perbuatannya disamping seluruh apa yang terjadi pada rakyat yang dipimpinnya. Baik dan buruknya perilaku dan keadaan rakyat tergantung kepada pemimpinnya.

C. Kompetensi Aparat Desa

Kompetensi kinerja menurut Pandey *et al* mengartikan bahwa berbagai sifat atau kemampuan pengetahuan serta keahlian seseorang (aparatus desa) yang diterima atau dipelajari melalui program pendidikan, pelatihan maupun pengalaman sehingga mampu menjalankan tugas dan kegiatan dengan hasil yang diinginkan.¹¹ Kegiatan belajar memungkinkan pekerja memperoleh berbagai pengertian, keterampilan dan perilaku terutama dalam meneruskan kompetensi dan kebudayaan pada generasi penerus.

Kompetensi dalam penelitian Juniarti *et al* ialah kemampuan seseorang dalam menjalankan atau mengaplikasikan kegiatannya yang didasari dengan keahlian, pengetahuan, kreativitas dan pengalaman yang sudah ada sebelumnya guna mendapat hasil yang diharapkan.¹² Tindakan tersebut dipakai oleh karyawan untuk

¹¹ Juneidy Pandey, Burhannudin Kiyai, and Joorie Ruru, “Pengaruh Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Desa,” *JAP* 3, no. 31 (2015): 1–11.

¹² Ulvia Juniarti, Biana Adha Inapty, and Intan Rakhmawati, “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening,” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 3 (2022): 608–20, <https://doi.org/10.29303/risma.v2i3.298>.

menyelesaikan tugas pekerjaan mereka dengan memuaskan dan apa yang diberikan karyawan dalam bentuk yang berbeda-beda dengan tingkatan kinerjanya. Menurut ungkapan Spancer mengartikan kompetensi ialah karakter yang mendasari seseorang yakni yang berhubungan dengan rangkaian kinerja yang baik.¹³ Hal ini kompetensi terdapat pada bagian dalam setiap individu dan selamanya ada pada kepribadian manusia yang menentukan tingkah laku dan performansi secara luas pada setiap keadaan dan kegiatan atau *job tasks*.

Sedangkan aparat desa merupakan bagian susunan dari pemerintah yang tersusun atas kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa dalam mengaplikasikan kinerjanya dipimpin oleh kepala desa dan dibantu dengan sekretaris desa serta perangkat desa lainnya, diantaranya kepala-kepala kegiatan, palaksana kegiatan dan kepala dusun. Pemerintah desa untuk menjalankan dan melancarkan kegiatannya biasanya membuat peraturan desa yang disahkan oleh kepala desa bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).¹⁴ Adapun peran aparat desa ialah sebagai suatu pengelola desa yang berperan penting dalam memajukan negara melalui desa. Aparat desa merupakan bagian dari struktur pemerintah desa, aparat desa juga dituntut untuk bisa mengelola dan memajukan masyarakat serta segala sumber daya yang dimiliki desa.¹⁵

Kesimpulan dari pengertian kompetensi aparatur desa adalah kemampuan mutlak yang diperlukan para aparat desa dalam menjalankan program pengembangan dan memajukan desa dengan menggunakan berbagai aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepribadian yang baik. Aparat yang berkompentensi sangat mempengaruhi kesejahteraan desa, oleh karena itu aparat desa dihimbau dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan harus dengan maksimal dan tanpa melihat latar belakang untuk pembangunan potensi desa masing-masing.

¹³ Pramularso Eigis Yani & Spancer M, "Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan CV Inaura Anugerah Jakarta," *Widya Cipta* 2, no. 1 (2018): 40–46.

¹⁴ Faizatul Karimah, Choirul Saleh, and Ike Wanusmawatie, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)," *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 4 (2014): 597–602, <https://media.neliti.com/media/publications/78859-ID-pengelolaan-alokasi-dana-desa-dalam-pemb.pdf>.

¹⁵ Gunawan Batara Indra, *Mengenal Perangkat Desa* (Jakarta: Erlangga, 2013).

Hasil dari penelitian Mada,¹⁶ Tarjo¹⁷ dan Suhartini¹⁸ memperoleh bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian dari Sweetenia¹⁹ dan Ulvia²⁰ mengungkap bahwa kompetensi aparat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam membentuk kompetensi terdapat lima karakteristik menurut Mahmudah diantaranya yaitu:²¹

1. Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem.
2. Ketrampilan merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan.
3. Konsep diri dan nilai-nilai yang merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia berhasil dalam suatu situasi.
4. Karakteristik pribadi: merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti

¹⁶ Mada, Kalangi, and Gamaliel, “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo,” 2017.

¹⁷ Tarjo, “Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Pada Desa Muara Niro Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo) Tarjo 1 1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Setih Setio Muara Bun,” *Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram* 5, no. 2 (2019): 1/16, <http://ejournalstiamataram.ac.id>.

¹⁸ Ade Suhartini et al., “Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Kompetensi Aparatur Desa, Religiusitas Dan Pengawasan Masyarakat,” *Equity* 24, no. 2 (2021): 175, <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.3699>.

¹⁹ Amanda Mutiara Sweetenia et al., “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa,” *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 17, no. 1 (2019): 44–56, <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2752>.

²⁰ Juniarti, Adha Inapty, and Rakhmawati, “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening,” 2022.

²¹ Mahmudah Lubis, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan SAP Berbasis Akrual, Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi ” (Universitas Sumatera Utara (RI-USU), 2018).

pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan.

5. Motif merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan.

Petunjuk aparatur sebagai pengelola dana desa untuk memenuhi kompetensinya menurut Edinson *et al* dalam Polutu ialah bertumpu pengetahuan dari hasil belajar dengan cara formal maupun pelatihan yang pernah diikuti, memiliki kemahiran dan bisa menyelenggarakan kegiatan secara detail, efektif, dan efisien, serta dapat menjunjung tinggi sikap organisasi dan mempunyai perilaku yang baik dalam bekerja.²²

Menurut Ningrum ada beberapa indikator yang harus dimiliki oleh masing-masing individu guna membentuk sebuah kompetensi yang baik, antara lain:²³

1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh seorang aparat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang tertentu.

2. Ketrampilan

Ketrampilan adalah sebuah upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh pemimpin kepada seorang aparat dengan baik dan maksimal.

3. Sikap

Sikap adalah tingkah laku seseorang atau aparat dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh perusahaan.

D. Sistem Pengendalian Internal

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 mengungkapkan sistem pengendalian internal merupakan proses yang tersusun atas tindakan dan aktivitas yang berjalan secara terus-menerus oleh kepala pimpinan dan seluruh karyawan untuk meyakinkan atas tercapainya tujuan melalui kegiatan yang efektif dan efisien.²⁴ Sebagai pemberi

²² Adriansah Polutu, "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," 2022.

²³ Khoirina Kencana Ningrum, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara," *E-Journal UAJY*, 2017, 2017.

²⁴ Nadia Milazzo et al., "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah," *Physical*

teladan untuk dituruti seluruh pegawai dan bisa mendorong terwujudnya hal-hal yang diinginkan, maka suatu organisasi harus konsisten atau berperiodik dalam menjalankan aktivitasnya.

Sedangkan sistem pengendalian internal menurut Mulyadi ialah suatu tatanan organisasi, bentuk dan metode yang diatur untuk menjaga kepemilikan organisasi, memeriksa kemampuan dan ketelitian data keuangan, mengembangkan efisiensi dan memewajibkan dipatuhinya kebijakan. Sistem pengendalian internal juga bisa diartikan suatu cara untuk meminimalisir terjadinya kesalahan informasi yakni dengan cara evaluasi keuangan.²⁵ Sistem pengendalian yang dimaksudkan adalah seluruh pegawai mengetahui aturan untuk berintegritas dan melaksanakan kegiatan dengan sepenuh hati dengan berlandaskan pada nilai etika yang berlaku.

Sistem pengendalian internal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin dengan cara terus-menerus guna meyakinkan suatu organisasi atas terwujudnya tujuan yang diinginkan.²⁶ Kesimpulan dari beberapa pengertian diatas sistem pengendalian internal merupakan suatu kegiatan yang terstruktur oleh pimpinan dan dilakukan secara terus menerus guna memberikan keyakinan pada suatu lembaga atas terciptanya kinerja yang baik dan sesuai yang diharapkan. Sehingga dalam pengawalan pengalokasian dana desa pun sangat membutuhkan adanya pengawasan penyalurannya dan diharapkan pelaksanaan dana desa dapat dengan mudah terorganisir.

Aparat pusat atau aparat daerah berkewajiban maksimal akan pengaplikasian berbagai tugas dalam aparat desa. Karena pemerintah desa dituntut untuk menerapkan *good government* pada setiap apa yang diselenggarakan. Terdapat tiga tahapan dalam sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada aparat desa yang harus dilaksanakan, yaitu:²⁷

Review A 100, no. 1 (2008): 1612–16, <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf%0Ahttp://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Six+easy+pieces:+essentials+of+physics,+explained+by+its+most+brilliant+teacher#0%0Ahttp://arxiv.org/abs/1604.07450%0Ahttp://www.theory.>

²⁵ Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: salemba empat, 2017), 129.

²⁶ Komang Rediastiti, “Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa, Kompetensi Aparatur Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Di Kabupaten Buleleng,” 2022.

²⁷ M. Khoiru Rusyadi, “Sistem Pengendalian Intern Keuangan Desa,” Ikatan Akuntansi Indonesia Wilayah Jawa Timur, n.d., <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/19>.

1. Tahap Persiapan

a. Pembentukan satuan tugas penyelenggaraan SPIP

Dalam penyelenggaraan SPIP, setiap Kepala Desa perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP. Satgas tersebut bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP. Dengan kata lain, satgas bertugas untuk mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP, berkoordinasi dengan Satgas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.

b. Pemahaman/*Knowing*

Pemahaman/*knowing* adalah tahap untuk membangun kesadaran (*awareness*) dan persamaan persepsi. Kegiatan ini dimaksudkan agar setiap individu mengerti dan memiliki persepsi yang sama tentang SPIP. Materi yang perlu dipahami dalam tahap ini meliputi:

- 1) Pentingnya SPIP sebagai sarana pengendalian berkelanjutan dan perangkat pengaman dalam proses pencapaian tujuan.
- 2) Perkembangan sistem pengendalian intern di Indonesia sampai saat ini.
- 3) Pengertian SPIP
- 4) Uraian unsur dan subunsur SPIP.
- 5) Penjelasan perbedaan antara Waskat dengan SPIP ditinjau dari faktor definisi, sifat, kerangka pikir (*framework*), tanggung jawab, keberadaan, dan penekanan.
- 6) Penjelasan peranan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan) dalam SPIP.

c. Pemetaan

Pemetaan adalah tahap diagnosis awal yang dilakukan sebelum penyelenggaraan SPIP. Pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi pengendalian internal pada pemerintah desa, yang mencakup keberadaan kebijakan dan prosedur, serta implementasi dari kebijakan dan prosedur tersebut terkait penyelenggaraan subunsur SPIP. Data untuk pemetaan dapat diperoleh melalui penyebaran VALisioner atau melalui penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD). Data tersebut perlu diuji validitasnya melalui uji silang dengan melakukan wawancara, reviu dokumen secara sepiantas (*walkthrough test*), dan observasi.

d. Penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, perlu disusun rencana kerja penyelenggaraan/pengembangan SPIP dengan memerhatikan karakteristik organisasi yang meliputi kompleksitas organisasi, SDM, dan perspektif pengembangannya. Untuk dapat menyusun rencana kerja SPIP tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu fungsi dan tujuan organisasi. Selanjutnya, unit kerja perlu mendefinisikan/operasionalisasi SPIP sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi. Berdasarkan operasionalisasi SPIP tersebut ditetapkan tujuan, lingkup kerja, prioritas, dan strategi pengembangan SPIP.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap penyelenggaraan SPIP di unit kerja dengan mempertimbangkan *areas of improvement* (AOI) yang dihasilkan pada saat pemetaan. Tahap pelaksanaan terdiri atas tiga tahapan, yaitu pembangunan infrastruktur (*norming*), internalisasi (*forming*) dan pengembangan berkelanjutan (*performing*).

a. Pembangunan Infrastruktur (*norming*)

Infrastruktur meliputi segala sesuatu yang digunakan oleh organisasi untuk tujuan pengendalian, seperti kebijakan, prosedur, standar, pedoman, yang dibangun untuk melaksanakan kegiatan. Pembangunan infrastruktur mencakup kegiatan untuk membangun infrastruktur maupun memperbaiki infrastruktur yang ada sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang diungkap dalam AOI.

b. Internalisasi (*forming*)

Internalisasi adalah proses yang dilakukan unit kerja untuk membuat kebijakan dan prosedur menjadi kegiatan operasional sehari-hari yang ditaati oleh seluruh aparatur atau pemerintah. Untuk memastikan implementasi kebijakan, prosedur dan pedoman dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan, pemerintah dapat membuat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas seluruh aparat dalam melaksanakan kebijakan, prosedur dan pedoman tersebut.

c. Pengembangan berkelanjutan (*performing*)

Setiap infrastruktur yang ada harus tetap dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan agar tetap memberikan manfaat yang optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Tahap ini memanfaatkan hasil proses pemantauan penyelenggaraan SPIP. Kegiatan pemantauan dilaksanakan

oleh setiap tingkat pimpinan di unit kerja agar setiap penyimpangan yang terjadi dapat segera diidentifikasi untuk dilakukan tindakan perbaikannya.

Pemantauan dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, tindak lanjut hasil audit. Kegiatan ini menghasilkan laporan hasil pemantauan atau evaluasi. Pemantauan juga dapat dilakukan melalui penilaian sendiri (*self assessment*). Penilaian sendiri adalah sarana untuk melibatkan manajemen dan semua pegawai secara aktif dalam evaluasi dan pengukuran efektivitas sistem pengendalian intern.

3. Tahap Pelaporan

Dalam rangka pengadministrasian kegiatan SPIP, perlu disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan SPIP. Laporan penyelenggaraan SPIP disusun untuk seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP, yang antara lain:

- a. Pelaksanaan kegiatan, menjelaskan persiapan dan pelaksanaan kegiatan serta tujuan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan penyelenggaraan.
- b. Hambatan kegiatan, menguraikan hambatan pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada tidak tercapainya target kegiatan tersebut.
- c. Saran perbaikan, berisi saran untuk mengatasi hambatan agar permasalahan tersebut tidak terulang dan saran dalam upaya peningkatan pencapaian tujuan.
- d. Tindak lanjut atas saran pada periode sebelumnya.

Berikut terdapat lima indikator pengendalian internal yakni lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, kegiatan informasi dan komunikasi, penilaian risiko serta pengawasan yang bisa diaplikasikan dalam organisasi swasta atau publik dan cenderung pada keuntungan maupun kerugian. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 lima indikator sistem pengendalian internal pemerintah, yaitu:²⁸

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan keadaan dalam lembaga pemerintah yang memberikan pemahaman para pegawai akan pentingnya sistem pengendalian dalam organisasi untuk menjadi pribadi yang lebih akuntabel.

²⁸ Milazzo et al., “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.”

2. Kegiatan pengendalian
Kegiatan pengendalian merupakan perbuatan yang dibutuhkan untuk mengendalikan risiko hingga pengaplikasian kebijakan secara efektif.
3. Informasi dan komunikasi
 - a. Informasi merupakan data yang sudah dipilah dan bias digunakan guna mengambil keputusan dalam menjalankan kegiatan lembaga pemerintah.
 - b. Komunikasi merupakan suatu cara untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai cara baik secara tersurat atau tersirat dan bertujuan mendapat umpan balik.
4. Penilaian risiko
Penilaian risiko merupakan aktivitas penilaian atas dugaan terjadinya keadaan yang menekan tercapainya harapan dan tujuan lembaga pemerintah.
5. Pengawasan atau pemantauan
Pengawasan merupakan proses pemantauan kinerja sistem pengendalian internal dan proses meyakinkan bahwa hasil audit dan pertimbangan lainnya secepatnya ditindaklanjuti.

E. Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Baridwan Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem organisasi yang mengakumulasi, menggabungkan, menghasilkan dan memberi informasi keuangan yang berarti untuk mengambil keputusan terhadap pihak dari luar (semacam inspeksi pajak, investor atau kreditor) dan pihak dari dalam (manajemen).²⁹ Sistem informasi yang dimaksud juga untuk memudahkan para pegawai guna menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset perusahaan.

Sistem informasi akuntansi dapat diartikan sebagai laporan perkembangan atau catatan guna menyediakan informasi yang berkaitan dengan finansial desa yang pastinya sangat diperlukan para aparat desa untuk memudahkan jalannya pengelolaan dana desa. Sistem informasi akuntansi pada pengelolaan dana desa akan memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap ketidakstabilan pengelolaan dana desa yang ada serta sistem

²⁹ Zaki Baridwan, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: BPFE, 2003), 48.

informasi akuntansi yang baik akan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa yang terdapat pada desa tersebut.³⁰

Pentingnya peningkatan kapasitas sistem informasi akuntansi yaitu guna dapat bersaing di era globalisasi kemajuan zaman mendatang selain meningkatkan kapasitas, peningkatan keahlian dalam akuntansi juga harus diasah. Penggunaan dan penerapan sistem informasi akuntansi juga dapat memudahkan para aparat desa dalam mengendalikan dan mengatur data terutama yang berhubungan dengan ekonomi dan dapat meminimalisir kesalahan serta dapat menjaga konsistensi dari proses ke proses. Dalam hal mengelola dana desa menggunakan sistem informasi akuntansi sangat penting karena dapat menentukan arah pengelolaan serta penggunaan dana desa yang benar dan sesuai.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 pasal (1), keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa yang bisa dinilai dengan hal finansial, termasuk didalamnya berbagai bentuk kepemilikan yang berkaitan atas hak dan kewajiban desa tersebut. Apabila dilihat dari ruang lingkupnya, keuangan desa meliputi kepemilikan desa yang dikelola langsung oleh pemerintah desa dan kepemilikan desa yang dipisahkan pengurusannya. Kepemilikan desa yang dikelola langsung oleh pemerintah desa meliputi APBDes dan barang-barang inventaris milik desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 93 ayat (1) menyatakan pengelolaan keuangan desa antara lain: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Ayat (2) menyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Kesimpulan dari akuntabilitas dalam hal keuangan merupakan tanggung jawab yang dimiliki lembaga pemerintah untuk mengaplikasikan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas mewajibkan para pemerintah guna membuat laporan keuangan atas gambaran kinerja finansial organisasi terhadap pihak

³⁰ Muhammad Fadil, "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)," 2020.

luar atau masyarakat. Adapun karakteristik atau ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan laporan akuntansi, yaitu:³¹

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Terdapat beberapa indikator sistem informasi akuntansi menurut Baridwan ialah sebagai berikut:³²

1. Pengumpulan data
2. Pengoprasian data
3. Pengendalian dan pengamanan data
4. Pengolahan data
5. Penyediaan informasi

Menurut Susanto indikator dalam mengukur efektifitas sistem informasi akuntansi yaitu:³³

1. Kinerja

Sistem harus dapat menyediakan hasil kerja yang diperoleh selama periode tertentu dan waktu respon yang cukup.

³¹ Martini, “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa,” 2019.

³² Zaki Baridwan, *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur Dan Metode* (Yogyakarta: BPF, 2009).

³³ Azhar Susanto., *Sistem Informasi Akuntansi – Pemahaman Konsep Secara Terpadu, Edisi Perdana, Cetakan Pertama*, pertama (Bandung: Lingga Jaya, 2017), 322.

2. Informasi atau data

Sistem harus mampu menghasilkan informasi yang dapat memberikan manfaat dan juga informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menemukan masalah dalam merealisasikan rencana dan menemukan kesempatan untuk memperbaiki penyimpangan.

3. Ekonomis

Sistem harus dapat menawarkan tingkat dan kapasitas pelayanan yang memadai untuk mengurangi biaya atau meningkatkan keuntungan.

4. Pengendalian

Sistem harus memiliki pencegah atau dapat mendeteksi kecurangan atau kegagalan sistem dan menjamin keamanan dari data informasi pemerintah.

5. Efisien

Sistem harus menggunakan secara maksimum sumber yang tersedia termasuk orang, waktu, data, meminimalkan penundaan proses, dan semacamnya dengan meningkatkan output dengan meminimalkan input.

6. Pelayanan

Sistem dapat menyediakan layanan yang diinginkan pada siapa saja yang membutuhkannya. Sistem juga harus fleksibel dan dapat dikembangkan.

Namun menurut Permadi indikator yang biasa digunakan untuk mengukur penerapan sistem informasi akuntansi pada keuangan desa adalah sebagai berikut.³⁴

1. Kesesuaian sistem informasi akuntansi dana desa dengan standar akuntansi pemerintah

Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah, karena sistem akuntansi pemerintah merupakan pedoman bagi akuntansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.

2. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya

Prosedur Pencatatan akuntansi pemerintahan daerah harus didasarkan pada kesesuaian dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum.

3. Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik

³⁴ Angga Dwi Permadi., *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemda Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Bandung: Universitas Widyatama, 2013), 11.

Laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah. laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik untuk mengukur kinerja secara periodik dan untuk kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Sehingga, suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai adalah pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan seseorang, maka dapat dijadikan bahan dasar untuk penelitian ini yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sri Devi, dkk (2020)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara). ³⁵	Hasil penelitian menunjukkan pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD).
2	Widia Yulianti, dkk (2019)	Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control terhadap Akuntabilitas	Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi aparat pengelola keuangan desa, Teknologi

³⁵ Sri Devi, Antong, "Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara)," 2020.

		Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018). ³⁶	Informasi, Sistem Akuntansi dan Internal <i>Control</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah desa pada pemerintahan desa di kecamatan pangkalan kuras.
3	Ni Luh Putu Ari Sutrepti, dkk (2022)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se- Kecamatan Petang. ³⁷	Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan sistem pengendalian intern dan kompetensi aparatur pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa.
4	Adriansah Polutu, dkk (2022)	Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal & Sistem Informasi Akuntansi Terhadap	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa dan sistem pengendalian internal

³⁶ Widia Yulianti, Kamaliah, and Rasuli, "Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)," 2019.

³⁷ Sutrepti, Sumadi, and Muliati, "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa SeKecamatan Petang," 2022.

		Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. ³⁸	serta sistem informasi akuntansi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kabila Bone.
5	Komang Rediastiti (2022)	Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa, Kompetensi Aparatur dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Di Kabupaten Buleleng. ³⁹	Hasil penelitian ini adalah sistem informasi keuangan desa, Kompetensi Aparatur dan Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Buleleng
6	Siska Wahyuni, dkk (2018)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu. ⁴⁰	Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi dan kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

³⁸ Adriansah Polutu, "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," 2022.

³⁹ Komang Rediastiti, "Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa, Kompetensi Aparatur Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Di Kabupaten Buleleng," 2022.

⁴⁰ Wahyuni, Indrawati, and Azhar L, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi Dan Kompetensi Aparat Terhadap

7	Ilham Akbar, dkk (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir. ⁴¹	Hasil penelitian menunjukkan pengaruh kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah (spip), dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
8	Yenty Astari Dewi, dkk (2021)	<i>Internal Control System, Utilization Of Accounting Information Technology, On Village Fund Management Accountability.</i> ⁴²	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan teknologi informasi akuntansi dan kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akutabilitas pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas Penganlolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu),” 2018.

⁴¹ Ilham Akbar, Ruhul Fitrius, “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa , Partisipasimasyarakat Terhadap Akuntabilitas Jom Feb , Volume 7 Edisi 2 (Juli – Desember 2020).”

⁴² Yenty Astari Dewi, Nasfi Nasfi, and Mai Yuliza, “Internal Control System, Utilization of Accounting Information Technology, on Village Fund Management Accountability,” *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 5, no. 1 (2021): 190–203, <https://doi.org/10.29040/ijebar.v5i1.2040>.

9	Mufti Arief Arfiansyah (2020)	Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. ⁴³	Hasil penelitian menunjukkan sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
10	Zaenal Afifi, dkk (2021)	<i>The Effect Of Internal Control System And Village Apparatus Competence On Village Fund Management Accountability.</i> ⁴⁴	Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

G. Kerangka Berfikir

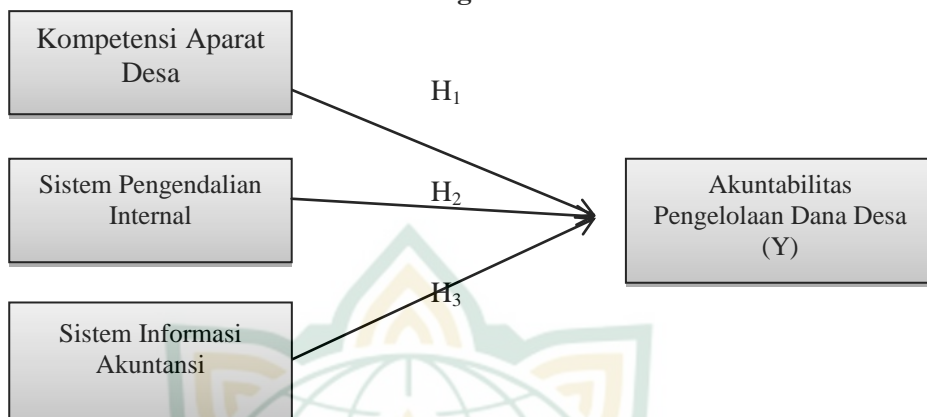
Berdasarkan penelitian yang akan dibahas, perlu adanya kerangka berfikir yang merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁵ Kerangka berfikir disini menjelaskan pola hubungan antara variabel independen (X) dan dependen (Y) dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁴³ Mufti Arief Arfiansyah, "Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>.

⁴⁴ Z Afifi, M Mulyanto, and D H Nugroho, "The Effect of Internal Control System on Village Fund Management Accountability; Empirical Study in Kudus Regency," *Jurnal Magister Administrasi ...* 2021, no. 3 (2021): 1120–24, <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jmap/article/view/3738>.

⁴⁵ Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D.* (Bandung: Alfabeta., 2019), 72.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Sumber: Kerangka berfikir diolah, 2023

Berdasarkan bagan diatas menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara pengaruh kompetensi aparat desa, sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H. Hipotesis

Penelitian ini menunjukkan hipotesis dari kompetensi aparat, sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Jepara Tahun 2022-2023 sesuai dengan pengamatan dari penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

1. Pengaruh kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan teori yang sudah ada, faktor sumber daya manusia (SDM) dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena adanya peran sumber daya manusia menjadikan laporan keuangan yang berkualitas.⁴⁶ Hal ini juga searah dengan teori *stewardship* dimana aparat yang berperan sebagai pelayanan yang berkewajiban untuk dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban, dengan memberikan pelayanan

⁴⁶ CA Ika Sasti Ferina, S.E, M.Si, Ak, CA Drs. Burhanuddin, Macc, Ak, and S.E Herman Lubis, “Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir),” no. 6 (2016).

yang baik sesuai dengan tugas masing-masing, diharapkan pada saat pengambilan keputusan yang baik pula.

Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian sebelumnya bahwa kompetensi aparat desa memiliki pengaruh cukup besar dan signifikan terhadap kesuksesan akuntabilitas pengelolaan dana desa.⁴⁷ Selain dari peneliti diatas dalam penelitian Fajar⁴⁸, Akbar⁴⁹ dan Dewi⁵⁰ mengungkap bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis:

- H₁: Kompetensi aparat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Terciptanya sistem pengendalian yang baik terhadap pemerintah desa pastinya akan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan yang bertanggungjawab. Ungkapan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Puspa dan Prasetyo bahwa kegiatan organisasi yang efektif dan efisien perlu menerapkan sistem pengendalian internal yang baik pula, sehingga kemampuan laporan keuangan terlaksana yakni akuntabilitas pengelolaan dana desa.⁵¹

Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Widyatama *et.al.*, Dalam pemerintahan sistem pengendalian internal ialah variabel penting, dikarenakan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal aparat desa dan

⁴⁷ Dwi Fitri Puspa and Riky Agung Prasetyo, “Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 20, no. 2 (2020): 281–98, <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>.

⁴⁸ Fajar Rahmatulloh, Khoirul Aswar, Ermawati, “Affecting Factors on Accountability of Village Fund Allocation Management in Bogor District” 11, no. 4 (2019): 43–49.

⁴⁹ Ilham Akbar, Ruhul Fitrius, “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa , Partisipasimasyarakat Terhadap Akuntabilitas Jom Feb , Volume 7 Edisi 2 (Juli – Desember 2020).”

⁵⁰ Dewi, Nasfi, and Yuliza, “Internal Control System, Utilization of Accounting Information Technology, on Village Fund Management Accountability,” 2021.

⁵¹ Puspa and Prasetyo, “Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” 2020.

bisa berpengaruh pada akuntabilitas dan transparansi aparat desa tersebut.⁵² Bahkan dalam penelitian Afifi⁵³ dan Akbar⁵⁴ menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis:

H₂: Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

3. Pengaruh sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan fenomena yang sudah ada untuk menciptakan struktur pemerintahan yang baik bisa diawali dengan beberapa tahapan salah satunya dengan merancang proses perencanaan dan penganggaran sampai dengan terwujudnya suatu tujuan dimana masyarakat harus berperan aktif didalamnya. Pengetahuan akan akses informasi menjadi kebutuhan wajib yang harus terpenuhi dari setiap lembaga pemerintah. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu sistem pengolahan data yang dapat memudahkan organisasi atau struktur untuk menghasilkan informasi akuntansi yang diinginkan. Menurut Baridwan sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem organisasi yang mengakumulasi, menggabungkan, menghasilkan dan memberi informasi keuangan yang berarti untuk mengambil keputusan terhadap pihak dari luar (semacam inspeksi pajak, investor atau kreditor) dan pihak dari dalam (manajemen).⁵⁵

Penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dimana pelaporan informasi keuangan dan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa begitu sangat penting. Pendapat tersebut dikuatkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadil bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif

⁵² Arif Widyatama, Lola Novita, “Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa,” 2017.

⁵³ Afifi, Mulyanto, and Nugroho, “The Effect of Internal Control System on Village Fund Management Accountability; Empirical Study in Kudus Regency.”

⁵⁴ Ilham Akbar, Ruhul Fitrius, “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa , Partisipasimasyarakat Terhadap Akuntabilitas Jom Feb , Volume 7 Edisi 2 (Juli – Desember 2020).”

⁵⁵ Baridwan, *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur Dan Metode*, 2009; 3.

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.⁵⁶ Dalam penelitian Yulianti⁵⁷ dan Wahyuni⁵⁸ juga mengungkapkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis:

H₃: Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.



⁵⁶ Muhammad Fadil, “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal),” 2020.

⁵⁷ Widia Yulianti, Kamaliah, and Rasuli, “Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan),” 2019.

⁵⁸ Wahyuni, Indrawati, and Azhar L, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi Dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Penganlolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu),” 2018.